



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AIDIL ADHA
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 266461

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.740.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 630 m2/408 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/30 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
4. Tanah Seluas 97 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.631.889.715**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 5.521.889.715

III. HUTANG Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 5.521.889.715**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.